

PERAN HUMAS DALAM MENGELOLA KONFLIK

(Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Periode April - Oktober 2014)

Ujang Rusli Suherli
Alumni Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

ABSTRACT

This research was conducted to describe the role of Kulon Progo Public Relations in managing conflicts, related to the International Airport development plan in Temon. Because Government of Kulon Progo regency was responsible for the conflict about International Airport development plan. Based on the issuing of presidential instruction No. 2, 2013 about home security handling, the government of Kulon Progo plays a role to handle the social conflicts in Temon.

This research is a descriptive study in a government agency by using qualitative research methods with the primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. PR does socialization, negotiation, and approaching informally towards people who will be affected by this airport mega project. Pr also forms of deliberation with police, legislative, sub district head, and village heads of the five regions who affected by the airport mega project. Pr gives information in accordance with actual situation to the public and media about Airport Development plan in Temon and applying additional punishment for residents who commit vandalism.

Keywords : *The Role of Public Relations, Social Conflict, International Airport Development Plan.*

PENDAHULUAN

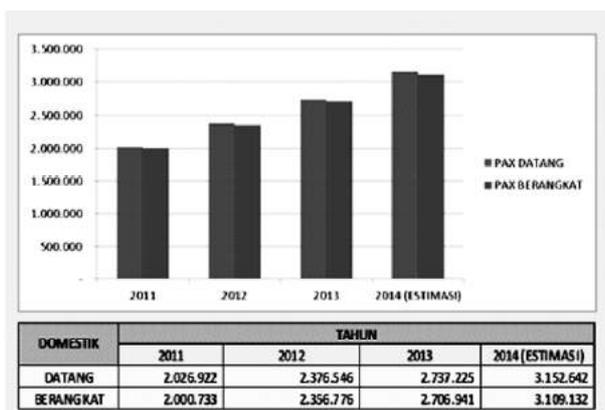
Kebutuhan sarana transportasi disebut negara sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Era globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi suatu negara karena batas-batas antar negara dan provinsi yang terpisah-pisah. Mengetahui atau mengikuti perkembangan zaman menjadi suatu kewajiban bagi sebuah negara karena persaingan yang

semakin ketat baik dalam bidang teknologi, perekonomian, maupun pembangunan, termasuk sarana transportasi. Sarana transportasi yang erat kaitannya dengan perkembangan dan kemajuan suatu negara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sebagai salah satu negara kepu-
luan yang besar tentunya membutuhkan sarana transportasi yang memadai khususnya sarana

transportasi udara untuk menjangkau satu wilayah dengan wilayah lainnya.

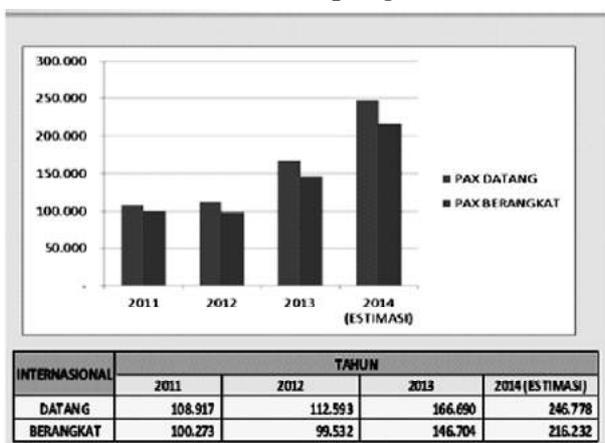
Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari segi moda transportasi udara. Namun, hal tersebut kurang didukung dengan infrastruktur Bandara yang bertaraf internasional yang memadai. Semakin tingginya tingkat kunjungan dan pariwisata ke Yogyakarta dengan menggunakan jasa penerbangan membuat Bandara Adisutjipto sebagai salah satu Bandara Internasional terpadat di Indonesia sudah tidak bisa lagi mampu menampung penerbangan baik Domestik maupun Internasional yang setiap tahunnya terus meningkat.

Grafik 1. Data Penumpang Domestik



Sumber data: General Affair and Communication PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Grafik 2. Data Penumpang Internasional



Sumber data: General Affair and Communication PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Dari data tersebut, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto setiap tahunnya. Persoalan yang dialami Bandara Adisutjipto saat ini yaitu hanya dapat menampung 1,2 juta penumpang per tahun. Berdasarkan data trafik tahun 2013, Bandara Adisutjipto telah melayani 64,9 juta pergerakan pesawat, 5,7 juta penumpang, serta 14,5 juta kilogram kargo.

Tabel 1. Data Pergerakan Penumpang, Pesawat dan Kargo 2009-2013

DATA PERGERAKAN PENUMPANG, PESAWAT & CARGO 2009-2013 (DOM DAN INTER)							
NO	TAHUN	PAX		CARGO		AIRCRAFT	
		DTG	BRGKT	DTG	BRGKT	DTG	BRGKT
1	2009	1.602.535	1.623.352	4.008.818	7.204.355	15.525	13.525
2	2010	1.831.209	1.808.744	4.752.110	7.567.368	14.216	14.213
3	2011	2.135.839	2.101.006	4.873.078	7.977.404	16.065	16.026
4	2012	2.489.139	2.456.307	4.975.391	9.484.186	18.583	18.330
5	2013	2.905.915	2.853.645	5.242.951	9.305.013	21.090	21.095
TOTAL		11.042.440	10.843.084	23.852.146	40.538.324	83.079	83.039
TOTAL RESERBUHAN		21.885.524		65.390.470		166.118	

Sumber data: General Affair and Communication PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Kapasitas sisi darat (*land side*) dan sisi udara (*air side*) Bandara Adisutjipto pun sudah tidak dapat menampung trafik yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bandara Adisutjipto telah mengalami *over capacity*. Selain itu, penggunaan Bandara Adisutjipto saat ini bersama dengan TNI AU sehingga terjadi pembatasan akses (limitasi) dalam penerbangan komersial. Landasan pacu (*run way*) sepanjang 2.200 meter pun sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena terdapat jembatan layang Janti dan sungai di sisi barat serta Gunung Boko di sisi timur (Sumber data: angkasapura1.co.id 9/4/14 pukul 19.48 WIB).

Over capacity nya Bandara Internasional Adisutjipto membuat Pemerintah dan PT. Angkasa Pura I (Persero) berencana membangun sebuah Bandara Internasional baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sebagai pengganti Bandara Adisutjipto.

Namun, rupanya rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut menimbulkan pertentangan dari warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara. Masyarakat pesisir selatan Kecamatan Temon yang akan



Gambar 1

Lokasi Mega Proyek Bandara Baru

Sumber data: *General Affair and Communication PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta*

terkena dampak mega proyek Bandara menolak keras rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut, seperti yang dilansir *Tribunnews.com* pada Hari Kamis, 10 April 2014 pukul 12.24 WIB:

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO- Ratusan warga mendatangi kantor Kecamatan Temon untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (10/4/2014). Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan sikap penolakan warga terhadap rencana pembangunan bandara tersebut. Di antaranya 'Kaum petani, menolak perampasan tanah', 'Pejabat ra mikirke rakyat', 'bandara bikin sengsara', 'Kami menolak data fiktif 550 kk', 'MP3EI adalah proyek kapitalis'. Warga jelas-jelas sudah menolak itu karena sampai sekarang belum ada penjelasan dari pemerintah." (dikutip dari *tribunnews.com* 6/5/14 pukul 7.12 WIB).

Warga yang tergabung dalam kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) sebagai kelompok masyarakat yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara melakukan aksi de-

montrasi menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Bandara yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon tersebut.



Gambar 2. Bentuk Penolakan Warga
Sumber data: Hasil Observasi Peneliti di Lapangan



Gambar 3. Warga Sedang Melakukan Aksi Demonstrasi
Sumber Data: PPID Kulon Progo

Warga memasang spanduk, papan, dan *tampah* yang beruliskan ancaman dan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Pemkab Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I (Persero) di sepanjang Jalan Glagah Kecamatan Temon.

Adanya penolakan tersebut sampai saat ini pembangunan Bandara Internasional belum bisa dimulai dan terancam molor dari jadwal yang telah ditargetkan yaitu pada awal tahun 2015. Pendirian Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo ini penting guna memenuhi kapasitas penumpang yang terus meningkat di Bandara Adisutjipto. Selain itu, pembangunan Bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penolakan pendirian Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo disebabkan karena warga resah dan takut rumah serta sumber penghidupannya hilang akibat pembangunan Bandara. Pasalnya, sebagian besar lokasi pembangunan Bandara adalah tanah pertanian yang subur dan produktif, sehingga warga menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo. Warga yang kontra melakukan aksi-aksi penolakan,

diantaranya: menolak pembebasan lahan, menolak sosialisasi, memblokir jalan raya, mencabut patok-patok batas Bandara, serta melakukan penyegelan Balai Desa Glagah. Akibatnya sampai saat ini PT. Angkasa Pura I (Persero) belum bisa memulai pembangunan Bandara Internasional tersebut.

Konflik muncul setelah rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menyeruak dikalangan masyarakat. Konflik semakin memanas ketika pejabat Desa dan pejabat Kecamatan Temon tidak bisa memenuhi keinginan warganya ketika diminta untuk menandatangani pernyataan menolak Bandara. Warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara pun ricuh dan mengamuk di Kecamatan Temon ketika berunjukrasa menolak pendataan terkait pembebasan lahan yang akan dijadikan mega proyek Bandara. Warga menganggap dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena, suara penolakan warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara tidak didengar dan cenderung diabaikan (Sumber data: *liputan6 petang* diakses 11/5/2014 pukul 8.56 WIB).

Konflik terkait rencana pembangunan

Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo sekarang ini sedang menjadi bahan diskusi khususnya di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan di salah satu media online yaitu *koransindonews.com* pada 14/01/2014:

“Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini adalah Pemkab Kulon Progo”. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan ikut campur dengan penolakan warga tersebut. Sultan meyakini Pemkab Kulon Progo masih mampu menyelesaikan pertentangan warga tersebut. Pemerintah Provinsi akan mengambil alih penanganan masalah ini jika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sanggup lagi menangani penolakan warganya.

Dhika, seorang Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Yogyakarta pada saat diwawancarai peneliti 12/06/2014 14.39 mengatakan:

“pihak yang bertanggungjawab menangani konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon adalah Pemkab Kulon Progo.” PT. Angkasa Pura I (Persero) hanya bertanggungjawab mengganti kerugian warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selaku pihak yang berwenang dan bertanggungjawab untuk segera bertindak menangani konflik yang terjadi agar konflik tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Masyarakat akan sangat *sensitive* jika permasalahan ini menyangkut dengan lahan atau tanah pertanian yang bisa menimbulkan hilangnya sumber penghidupan mereka akibat pembangunan Bandara. Karena bagi mereka tanah merupakan sebuah harta yang tak ternilai harganya.

Perlu ada pihak yang berkompeten untuk menangani konflik yang sedang terjadi di masyarakat terkait rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut. Pihak yang dimaksud adalah Hubungan Masyarakat Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Humas. Humas dalam instansi pemerintahan harus mampu menjadi pemecah masalah atau konflik di wilayahnya, serta memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurât ayat 9:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damai-kan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damai-kanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Dari ayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa dalam konflik perlu ada pihak yang menjadi penengah dan juga mediator untuk mendamaikan keduanya dengan cara bersikap netral dan adil sehingga bisa mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan konflik sosial yang terjadi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, pihak yang dimaksud menjadi penengah adalah Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menangani permasalahan yang terjadi di Kecamatan Temon. Karena, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional di Kabupaten Kulon Progo.

Tulisan ini bermaksud hendak memaparkan peran yang dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan bandara in-

ternasional di Kecamatan Temon periode April – Oktober 2014. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Humas Pemkab Kulon Progo Dalam Mengelola Konflik Terkait Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon periode April – Oktober 2014.

LANDASAN TEORI

1. Peran Hubungan Masyarakat

Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Public Relations dan Media Komunikas?*” (2007: 20-21), menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatannya Hubungan Masyarakat berperan sebagai berikut:

a. Penasihat Ahli

Seorang praktisi pakar *Public Relations* yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (*public relationship*).

b. Fasilitator Komunikasi

Praktisi *Public Relations* bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.

c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah

Peranan praktisi *Public Relations* dalam proses pemecahan persoalan *Public Relations* ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (*adviser*) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional.

d. Teknisi Komunikasi

Berbeda dengan tiga peranan praktisi *Public Relations* Profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan *Communication Technican* ini menjadikan praktisi *Public Relations* sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *method of communication*.

2. Tahapan Konflik

Menurut Fisher, dkk (2001: 19), ada lima tahap konflik, diantaranya:

a. Prakonflik

Ini merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

b. Konfrontasi

Pada tahap ini semakin terbuka. Jika satu pihak yang ada merasa masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara dua belah pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan.

c. Krisis

Ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

d. Akibat

Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Suatu pihak mungkin menye-

rah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua belah pihak menghentikan pertikaian. Apa pun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

e. Pascakonflik

Akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara dua belah pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

3. Pengelolaan Konflik

Menurut Moore dalam Susan Novri (2003: 6-12), ada beberapa bentuk pengelolaan konflik, diantaranya :

a. Avoidance

Pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan mengharapkan konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya.

b. Informal Problem Solving

Pihak-pihak yang berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.

c. Negotiation

Ketika konflik masih terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi. Artinya, mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil negosiasi bersifat *procedural* yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi.

d. Mediation

Munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak karena bisa dipandang

membantu para pihak yang berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.

e. Executive Dispute Resolutions Approach

Kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.

f. Arbitration

Suatu proses tanpa paksaan dari pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparisial.

g. Judicial Approach

Terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.

h. Legislative Approach

Intervensi melalui musyawarah politik dari lembaga perwakilan rakyat, kasus-kasus konflik kebijakan sering menggunakan pendekatan ini.

i. Extra Legal Approach

Penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan. Salah satu pihak bisa memanfaatkan kekuatan untuk menciptakan *nonviolent action* dan *violence*.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan menganalisa hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian yang sudah peneliti lakukan di Pemkab Kulon Progo. Di dalam bab ini peneliti akan memaparkan landasan-landasan teori yang akan menjadi acuan penelitian, diantaranya adalah:

1. Peran Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

a. Penasihat Ahli

Dalam mengelola konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Humas Pemkab Kulon Progo berperan sebagai Penasihat Ahli yaitu dengan membantu memberikan solusi dalam

pemecahan masalah serta memberikan pernyataan kepada Bupati mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan.

Hal senada diungkapkan oleh Rosady Ruslan (2007: 341) Humas pemerintah bertugas memberi nasihat atau sumbang saran untuk menggapai apa yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki publiknya.

Humas Pemkab Kulon Progo bertindak cepat ketika terjadi konflik. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan informan sebagai kroscek pembedan. Informan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Selama ini sebetulnya Pemkab juga sudah mengadakan pendekatan-pendekatan baik melalui masyarakat bawah, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, baik langsung melalui Bupati maupun lewat SKPD Kulon Progo. (Bapak Agus, Kepala Desa Glagah, wawancara 11 November 2014).

Humas sebagai Penasihat Ahli sangat berperan penting dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemkab Kulon Progo. Bupati langsung melakukan pendekatan-pendekatan dengan warga yang menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon sesuai dengan yang disarankan oleh Humas.

b. Fasilitator Komunikasi

Dalam Peran Humas sebagai Fasilitator Komunikasi, Peran Humas Pemkab Kulon Progo dalam mengelola konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon yaitu berkoordinasi dan bernegosiasi dengan para awak media serta memberikan informasi yang benar tentang proses pembangunan Bandara, dengan tujuan agar media tidak terlalu membesar-besarkan pemberitaan me-

ngenai pembangunan Bandara di wilayah Temon agar konflik tidak semakin memanas dikalangan masyarakat. Humas berperan sebagai Komunikator dalam kegiatan sosialisasi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

Humas membantu pihak Pemkab untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh warganya, serta memberikan penerangan-penerangan mengenai dampak-dampak positif jika ada Bandara di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya sosialisasi diharapkan warga bisa memahami, mendukung, serta menciptakan toleransi yang baik.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Dimcok dan Koening dalam Ruslan (2007: 341), Humas memberikan penerangan atau informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan.

c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah

Sebagai Fasilitator Proses Pemecahan Masalah Humas Pemkab Kulon Progo berperan membantu Bupati dalam pemecahan masalah yaitu dengan cara membuat tim, mengadakan rapat dengan kepala Desa, memberikan bantuan kepada warga, mengadakan pertemuan antara Pemkab dengan masyarakat guna membahas tuntutan-tuntutan warga, mencarikan lahan pengganti untuk warga yang terkena dampak mega proyek Bandara dan berupaya memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan yang tepat kepada warga sesuai dengan kemampuannya. Tujuannya adalah ketika ada Bandara mereka bisa terserap menjadi tenaga kerja lokal di Bandara.

d. Teknisi Komunikasi

Peran Humas yang terakhir sebagai teknisi komunikasi atau *method of commu-*

nication in organization. Dalam hal ini Humas Pemkab Kulon Progo berperan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan Pemkab dan PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon seperti mempublikasikan kegiatan sosialisasi pembangunan Bandara melalui media internet dengan membuat *press release*, dan *newsletter*.

2. Tahapan Konflik

a. Pra Konflik

Prakonflik yang terjadi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yaitu disebabkan oleh faktor komunikasi, terdapat ketidaksesuaian informasi yang didapat oleh warga masyarakat serta adanya unsur profokasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Warga tidak memahami dampak positif dari pembangunan Bandara tersebut. Hal ini dikarenakan warga tidak mendapatkan informasi secara utuh dari pemerintah mengenai rencana pembangunan Bandara. Komunikasi yang tidak efektif menimbulkan persepsi negatif dimata warga.

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus M. Hardjana (1994: 24) apapun alasannya, komunikasi yang gagal membuat isi berita atas pesan tidak lengkap dan tidak jelas, lengkap dan jelas tetapi tidak sampai pada si penerima tidak baik dan tepat pada waktunya, sampai dengan baik dan tepat pada waktunya tetapi tidak diterima dan ditangkap utuh. Karena itu hasilnya adalah salah pengertian dan salah paham, dan itu menyebabkan konflik. Sumber Daya Manusia yang rendah membuat warga masyarakat lebih mudah untuk dipengaruhi dan diprofokasi oleh pihak luar untuk menolak rencana pembangunan Bandara di Kecamatan Temon tersebut.

b. Konfrontasi

Pada tahap Konfrontasi, konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, semakin menyebarkan dikalangan masyarakat. Konflik pun semakin memanas ketika Pejabat Desa Glagah tidak bisa memenuhi keinginan warganya untuk mendukung menolak pembangunan Bandara. Warga yang tergabung dalam kelompok WTT pun ricuh dan mengamuk serta melakukan aksi penyegelan Balai Desa Glagah.

Aksi penyegelan dan perusakan Balai Desa Glagah yang dilakukan oleh kelompok WTT sebagai kelompok yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, mengakibatkan pelayanan publik terganggu. Aksi demonstrasi dan ketegangan-ketegangan antara warga masyarakat dengan pemerintah terjadi saat berlangsungnya sosialisasi rencana pembangunan Bandara Internasional baru di Kecamatan Temon. Masa memblokir akses jalan raya di sepanjang jalan Glagah. Aksi penolakan warga merupakan bentuk luapan emosi warga, warga merasa di anak tirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Suara penolakan warga yang tidak ditanggapi oleh pemerintah baik oleh Pemkab Kulon Progo maupun Pemda DIY membuat warga kesal dan emosi, sehingga warga turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi dan memblokir akses jalan di sepanjang jalan Glagah untuk menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon.

c. Krisis

Konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, juga

mengakibatkan krisis, yaitu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komunikasi antara kedua belah pihak pun terputus dan cenderung menuduh serta menentang pemerintah. Masyarakat yang menolak rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon tidak mempercayai hal-hal yang disampaikan oleh Pemkab Kulon Progo maupun PT. Angkasa Pura I (Persero).

d. Akibat

Akibat yang ditimbulkan dari konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yaitu krisis sosial. Masyarakat yang pro dan kontra saling bermusuhan, keresahan warga, penyegelan Balai Desa, pemblokadean jalan raya, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, akibat yang ditimbulkan dari konflik yaitu adanya aksi penyegelan Balai Desa Glagah. Akibat dari penyegelan Balai Desa yang dilakukan oleh warga penolak Bandara ini mengakibatkan anggota WTT dipanggil oleh pihak kepolisian terkait dugaan penyegelan dan perusakan fasilitas Desa Glagah. Pemkab Kulon Progo maupun Pemerintah Desa Glagah menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yaitu krisis sosial dan aksi penyegelan serta pengrusakan fasilitas Balai Desa Glagah yang mengakibatkan pelayanan publik terganggu yang dilakukan oleh kelompok WTT yang berujung dengan pemanggilan 7 terduga untuk diproses lebih lanjut.

e. Pascakonflik

Konflik terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan

Temon, Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih terus berlangsung. Aksi-aksi penolakan pun masih saja dilakukan oleh kelompok WTT. Namun, pihak Pemkab Kulon Progo berupaya melakukan pendekatan-pendekatan dengan warga baik yang pro maupun yang kontra terkait rencana pembangunan Bandara Internasional tersebut harapan konflik ini bisa terselesaikan dengan baik.

Humas Pemkab Kulon Progo telah berusaha melakukan pendekatan-pendekatan melalui hati ke hati kepada warganya yang akan terdampak Bandara dengan cara memberikan informasi-informasi, penerangan dan pemahaman yang sebenar-benarnya serta apa adanya mengenai proyek pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon, dengan harapan masyarakat bisa mendukung dan menyetujui proyek pembangunan Bandara tersebut.

3. Pengelolaan Konflik

a. Avoidance

Humas tidak melakukan penghindaran atau menghindari konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Humas berperan melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga masyarakat dengan tujuan untuk bisa mengetahui tuntutan dan keinginan-keinginan warganya yang akan terkena dampak mega proyek Bandara.

b. Informal Problem Solving

Humas berperan memberikan sumbang saran kepada Bupati untuk melakukan pendekatan secara informal di wilayah yang akan terkena dampak mega proyek Bandara, yaitu dengan cara bersilaturahmi dengan warga melalui kegiatan safari ramadhan, syawalan, memberikan bantuan, dan takziah ketika ada warganya yang meninggal dunia baik itu

warga yang netral, pro, maupun yang kontra.

c. Negotiation

Humas berperan melakukan negosiasi kepada warganya yang menolak dengan cara mendatangi langsung kelompok WTT sebagai kelompok yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara dengan didampingi Kepala Desa setempat. Humas melakukan pendekatan-pendekatan dengan perwakilan warga, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

d. Mediation

Humas dalam hal ini tidak berperan sebagai mediator terkait rencana pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Hal ini dikarenakan warga yang menolak rencana pembangunan Bandara sudah menutup diri dan tidak mau berkomunikasi dengan pemerintah. Warga penolak Bandara berprinsip pokoknya tidak! Terkait pembangunan Bandara di wilayah Temon, ini lah yang membuat Humas kesulitan untuk memediasi warganya.

e. Executive Dispute Resolutions Approach

Humas belum bisa menghadirkan pihak ketiga untuk memberi suatu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Warga yang kontra tidak mau diajak berkomunikasi dengan siapapun baik itu pemerintah maupun PT. Angkasa Pura I (Persero). Unsur profokasi yang membuat warga tidak mau berkomunikasi lagi dengan aparat pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Pemerintah Desa setempat.

f. Arbitration

Humas belum bisa menghadirkan pihak ketiga yang dianggap netral atau imparial, ini disebabkan warga yang kontra terhadap rencana pembangunan

Bandara sudah menutup diri, tidak mau bertemu dan dipertemukan dengan pihak manapun, baik pihak aparat pemerintahan maupun pihak PT. Angkasa Pura I (Persero). Warga yang kontra berprinsip *pokoke* Bandara harus dibatalkan. Warga takut Bandara hanya akan membuat masyarakat sengsara, karena Bandara akan dibangun diatas lahan pertanian warga yang subur dan produktif.

g. Judicial Approach

Humas berperan melakukan pendekatan dengan pihak kepolisian untuk memberi kepastian hukum terkait penyegelan dan pengrusakan Balai Desa Glagah yang dilakukan oleh kelompok WTT sebagai kelompok yang kontra terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional yang mengakibatkan pelayanan publik terganggu.

h. Legislative Approach

Humas berperan melakukan pendekatan legislatif melalui musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat yaitu DPRD, Camat, dan Kepala Desa setempat yang wilayahnya akan terkena dampak mega proyek Bandara guna memecahkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional.

i. Extra Legal Approach

Pemkab Kulon Progo telah menerapkan tindakan tegas kepada siapapun baik itu warga yang pro maupun kontra, yang berbuat vandalisme. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya konsultasi publik. Pemkab Kulon Progo menginginkan konsultasi publik berjalan lancar dan kondusif sehingga semua masyarakat baik pro maupun kontra bisa memahami maksud, tujuan, serta manfaat dibangunnya Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Dalam hal ini Humas berperan sebagai

penasihat ahli dengan memberikan sumbang saran dan pernyataan kepada Bupati tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi konflik secara langsung.

KESIMPULAN

Peran Humas Pemkab Kulon Progo bertanggung jawab dalam mengelola konflik di Kecamatan Temon terkait rencana pembangunan Bandara Internasional. Humas melakukan sosialisasi dan pemecahan masalah secara informal dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara yang dikemas dalam bentuk kegiatan safari ramadhan, syawalan, takziah, memberi bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat, melakukan negosiasi terhadap warga dan media, melakukan pendekatan judicial dan legislative dengan pihak kepolisian, DPRD, Camat, dan Kepala Desa dari lima wilayah terdampak Bandara dalam bentuk musyawarah guna merumuskan solusi pemecahan masalah yang sedang terjadi. Serta memberikan informasi yang aktual sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat dan media terkait pembangunan Bandara di Kecamatan Temon dan menerapkan hukum tambahan bagi warga yang berbuat vandalisme.

SARAN

Ada beberapa saran yang peneliti harapkan bisa menjadi masukan, meskipun saran ini jauh dari sempurna. Adapun saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagi PT. Angkasa Pura I (Persero)

- a. Alangkah baiknya jika PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku pembangun dan pengelola Bandara turun tangan langsung menangani konflik yang terjadi. Sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang detail langsung dari sumbernya mengenai konsep Bandara yang akan dibangun di wilayah Temon.
- b. Diharapkan PT. Angkasa Pura I (Perse-

ro) membuat program-program CSR yang berkelanjutan di wilayah yang akan terkena dampak mega proyek Bandara. Tujuannya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga diharapkan bisa menciptakan hubungan yang saling pengertian, menghargai, dan mendukung.

2. Bagi Pemerintah Provinsi DIY dan Pemkab Kulon Progo

- a. Peneliti berharap alangkah baiknya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX selaku Raja sekaligus Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan turun ke masyarakat, berbicara langsung kepada warga dengan memberikan pemahaman dan penerangan tentang dampak positif pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon. Sebab, penolakan yang terjadi semakin memanas.
- b. Dalam proses menyakinkan masyarakat yang akan terkena dampak mega proyek Bandara, Pemkab harus mempunyai metode komunikasi khusus sehingga tidak hanya terpaku pada Undang – Undang No. 2 Tahun 2010 mengenai pengadaan lahan bagi kepentingan publik saja. Dengan begitu diharapkan warga yang akan terkena dampak mega proyek Bandara memahami serta mendukung program pemerintah ini. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2009. Diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Agus M. Hardjana. 1994. *Konflik Di Tempat Kerja*. Yogyakarta: Kanisius

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fisher, Simon, dkk. 2001: *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Zed Books.
- Ismail Nawawi. 2009. *Manajemen Konflik Industrial*. Surabaya: ITSPress
- Kriyantono, Rakhmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Novri, Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pawito, Ph. D. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS
- Roy J. Lewicki, dkk. 2012. *Negosiasi Negotiation*. Jakarta: Salemba Humanika,
- Ruslan, Rosadi. 2007. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sumber Internet:
- <http://www.angkasapura1.co.id/> Diakses pada 9 April 2014 pukul 19.48 WIB.
- <http://www.koran-sindo.com/node/358469> Diakses pada 7 September 2014 pukul 13.24 WIB.
- <http://www.tribunnews.com/regional/2014/04/10/warga-demo-tolak-pembangunan-bandara-temon> Diakses pada 6 Mei 2014 pukul 07.12 WIB.
- <http://video.liputan6.com/read/2035482/ricuh-penolakan-pembangunan-bandara-kulon-progo> diakses 11/5/2014 pukul 8.56 WIB.